

2024

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN ANGGARAN
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

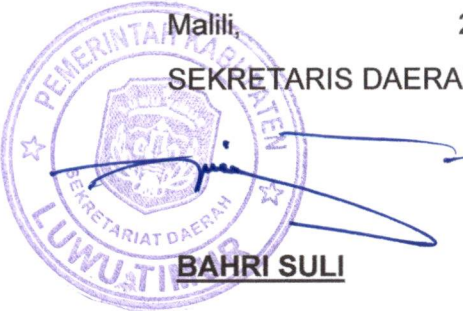
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program kegiatan dan sub kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Malili, 2024
SEKRETARIS DAERAH,

BAHRI SULI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	72
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	73
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	85
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	83
3.2. Program dan Kegiatan.....	90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH	104
BAB V PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	35
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	74
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Anggaran Tahun 2024	85
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	90
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025	94
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dibahas dalam forum SKPD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

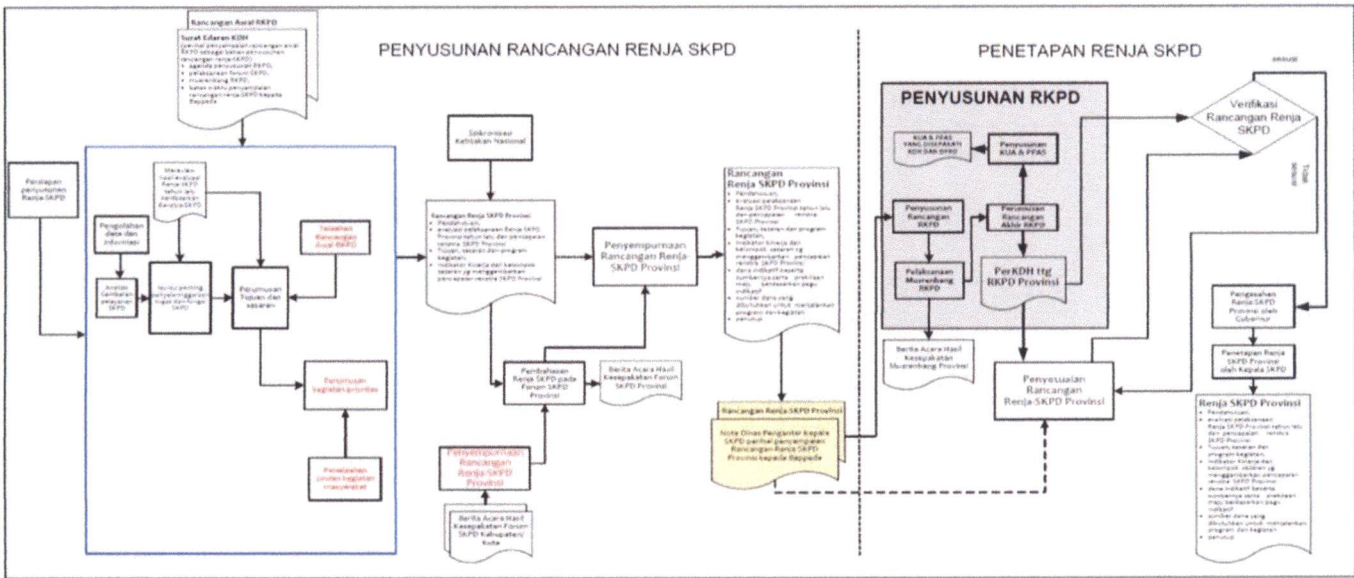
Proses penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan

review hasil evaluasi renja awal perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/Sub kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini ditujukan untuk menunjang atau mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021 - 2026.

Visi Bupati Luwu Timur, yaitu “ **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**”. Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul, menerapkan nilai-nilai budaya, dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sarana prasarana yang baik, berkualitas dan berteknologi tinggi, masyarakatnya makmur, tersedianya lapangan pekerjaan, terhapusnya kemiskinan dan profesionalisme aparatur. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh ;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas ;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat ;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari Ke-enam Misi diatas Sekretariat Daerah Mengemban Misi ke-4 yaitu: “ **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik** ”.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 53);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai Acuan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi:

- 1.1. Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
- 1.2. Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturanlainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

- 1.3. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja;
- 1.4. Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Pada bab ini memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. serta review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan pada tahun depan.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, 21 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.091.496.199,00 atau 34,63% dari total anggaran sebesar Rp66.689.405.984,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp64.756.155.984,00 dengan realisasi sebesar Rp23.083.829.949 atau sebesar 35,65 % dan Belanja Modal sebesar Rp1.933.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.666.250,00 atau sebesar 0,40 %. Untuk lebih jelasnya kinerja Sekretariat Daerah pada sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel 01 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC-29, lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s/d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
									I		II		III		IV										
2	3p	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.2.13.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar					100	30.155.880.197	18,54	4.146.756.983	19,25	7.581.760.207	-	-	37,79	11.739.497.890	37,79	38,93							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu					100	183.190.500	25,00	8.313.000	5	56.910.860	-	-	30,00	65.223.860	30,00	35,60						Bagian perencanaan dan Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	69.650.000	-	8.313.000	-	16.989.980			-	25.302.980	0	36,33							

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	14.453.500,00	-	-	-	1.673.880			-	1.673.880	0	11,58					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD					2	7.100.000,00	1	-	-	1.976.500	-		1	1.976.500	50	27,84					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10	91.987.000,00	4	-	2	36.270.500			6	36.270.500	60	39,43					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah					100	12.904.649.439	25,71	2.074.703.251	26,34	3.898.777.470	-	-	52,05	5.973.480.721	52,05	46,29					Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					96	12.584.849.139,00	84	2.051.636.751,00	85	3.830.226.870			84	5.881.863.621	87,50	46,74					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentasahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					21	57.910.300,00	9	10.834.500,00	9	59.009.300					9	69.843.800	43	120,61					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD					10	261.890.000,00	2	12.232.000	3	9.541.300					5	21.773.300	50	8,31					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar					100	108.533.200	25	20.482.000	25,00	12.645.000	-	-	-	-	50,00	33.127.000	50	30,52					Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					4	108.533.200	1	20.482.000	1	12.645.000					2	33.127.000	50	30,52					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu					100	29.300.000	25	-	25						50,00	10.980.700	50	37,48					Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah.					12	29.300.000,00	3	-	3	10.980.700					3	10.980.700	25	37,48					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	318.208.575	12,5	16.294.794	24,50	27.572.574	-	-	37,00	43.867.368	37,00	13,79							Bagian Umum
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12	82.468.575	3	5.000.000	3	1.066.075			6	6.066.075	50	7,36							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan					29	116.510.000	0	-	-	8.789.999			-	8.789.999	0	7,54							

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi i Kinerja dan Anggaran n Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan					25	119.230.000	3	11.294.794	6	17.716.500					9	29.011.294	36	24,33					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD.					100	3.073.344.605	25,62	399.079.782	21,76	835.082.785	-	-	47,38	1.234.162.567	47,38	40,16							Bagian Umum
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan					40	78.995.000	16	7.766.000	13	16.226.550					16	23.992.550	40	30,37					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					7	142.450.000	1	8.500.000	1	600.000					2	9.100.000	29	6,39					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan					7	345.840.000	1	7.666.250	-	-					1	7.666.250	14,29	2,22					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja SKPD Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan					52	416.601.805	13	26.246.200	13	99.953.600					13	126.199.800	25	30,29					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan					11	53.570.000	4	4.440.000	3	3.652.400					7	8.092.400	64	15,11					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan					1980	191.160.000	495	31.400.000	495	53.800.000					990	85.200.000	50	44,57					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya					12	457.025.000	3	64.301.000	3	152.558.400					6	216.859.400	50	47,45					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	1.387.702.800	3	248.760.332	3	508.291.835					6	757.052.167	50	54,55					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi i Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan					100	1.515.250.000	0		-	-		-		-		0	0					Bagian Umum			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan					104	248.000.000	0		-	-				-		0	0								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					34	529.750.000	0		-	-				-			0								
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung atau bangunan lainnya yang disediakan					4	737.500.000	0		-	-				-		0	0								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					100	1.862.658.684	25	312.348.324	25,00	363.992.367		-		-	50,00	676.340.691	50	36,31				Bagian Umum			

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s/d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	21.058.684	3	-	3	2.218.384					6	2.218.384	50	10,53					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan					12	1.091.600.000	3	227.848.324	3	251.523.983					6	479.372.307	50	43,91					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan					12	750.000.000	3	84.500.000	3	110.250.000					3	194.750.000	25	25,97					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik (%)					100	2.598.395.000	31,31	162.617.125	22,28	315.690.380	-	-	53,59	478.307.505	53,59	18,41							Bagian Umum

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					40	872.460.000	21	23.778.125	10	150.041.680					21	173.819.805	53	19,92					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasiona atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					3	46.500.000	1	-	1	14.496.000					1	14.496.000	33	31,17					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dipelihara					77	97.820.000	13	2.250.000	-	37.685.700					13	39.935.700	16,88	40,83					
	Pemeliharaan Meubel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					130	261.490.000	18	18.750.000	30	4.625.000					48	23.375.000	37	8,94					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					10	1.320.125.000	4	117.839.000	3	108.842.000					7	226.681.000	70	17,17					
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100	3.363.580.394	12,5	570.409.938	31,25	1.099.529.164	-	-	43,75	1.669.939.102	43,75	49,65							Bagian Umum
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2	791.956.394	2	148.082.242	2	196.971.966					2	345.054.208	100	43,57					
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan					9	77.000.000	0	-	-	-					-	-	0	0,00					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check-up KDH dan Wakil Kepala Daerah					8	100.000.000	0	-	-	-					-	-	0	0,00					
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima dana Penunjang Operasional KDH WKDH					2	2.394.624.000	2	422.327.696	2	902.557.198					2	1.324.884.894	100	55,33					
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess					100	1.775.100.000	23,41	256.193.000	20,63	364.397.500	-	-	44,04	620.590.500	44,04	34,96							Bagian Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan					3	860.000.000	2	120.000.000	2	182.500.000					2	302.500.000	67	35,17					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan				3	600.000.000	3	95.000.000	2	135.000.000					3	230.000.000	100	38,33					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan				7	315.100.000	2	41.193.000	2	46.897.500					2	88.090.500	29	27,96					
	Penataan Organisasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintah (Nilai)				65,85	1.117.363.300	-	237.464.924	-	407.999.787	-	-	-	-	-	645.464.711	0,00	57,77					Bagian Organisasi
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12	311.183.300	4	43.020.599	1	130.891.393					5	173.911.992	42	55,89					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s/d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2	171.048.000	1	30.105.000	-	70.791.894					1	100.896.894	50	58,99					
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1	226.566.000	-	4.801.000	-	168.121.000					-	172.922.000	0	76,32					
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana					1	106.236.500	-	2.580.000	-	16.079.500					-	18.659.500	0	17,56					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1	302.329.500	-	156.958.325	1	22.116.000					1	179.074.325	100	59,23					
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan keprotokoliran dan komunikasi pimpinan					765	1.306.306.500	180	88.850.845	180	199.162.320	-	-	-	-	246	288.013.165	32,16	22,05					Bagian Protokol dan Komunikasi

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
		yang dihasilkan																						nikasi Pimpinan
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil keprotokolan			255	621.025.500	60	53.539.845	60	74.977.430					120	128.517.275	47,06	20,69						
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12	142.309.000	3	10.551.000	3	20.267.605					6	30.818.605	50,00	21,66						
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan			255	542.972.000	60	24.760.000	60	103.917.285					120	128.677.285	47,06	23,70						
						30.155.880.197	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48,21	38,89						
							Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
4.01.02.201	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)					100	33.890.836.900	34,86	2.520.300.161	25	8.262.456.927	-	-	59,86	10.782.757.088	60	31,82							Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata pemerintahan yang dikelola (Rekomendasi)					4	485.279.000	2	27.031.035	-	116.987.562	-	-	2,00	144.018.597	50	29,68							Bagian Pemerintahan
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					4	140.642.000	0	23.121.035	-	15.812.100	-	-	-	38.933.135	0	27,68							

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					50	175.303.000	0	-	5	19.767.200					5	19.767.200	10	11,28					
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					4	169.334.000	2	3.910.000	-	81.408.262					2	85.318.262	50	50,38					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan					4	32.407.310.400	1	2.362.875.500	1	7.952.780.850	-	-	-		2,00	10.315.656.350	50	31,83					Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual					5	15.983.650.700	1	2.350.793.000	1	7.929.489.350					2	10.280.282.350	40	64,32					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial,					2	1.813.952.300	-	12.082.500	-	23.291.500					-	35.374.000	0	1,95					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
		Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB																						
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					1	14.609.707.400	-	-	1	-				1	-	100	0					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan (%)					100	896.441.500	44,44	115.538.821	18,04	174.189.415	-	-	62,48	289.728.236	62,48	32,32						Bagian Hukum
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun					400	205.755.600	170	30.874.818	96	51.178.815			266	82.053.633	66,50	39,88						
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum					9	524.577.500	5	70.803.913	1	108.567.800			6	179.371.713	67	34,19						
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi					400	166.108.400	141	13.860.090	76	14.442.800			217	28.302.890	54,25	17,04						

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renja PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab		
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)					30	101.806.000	4	14.854.805	4	18.499.100	-	-		-	8	33.353.905	26,67	32,76			Bagian Pemerintahan			
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri					4	78.426.000	1	13.654.805	1	11.968.000					2	25.622.805	50,00	32,67						
	Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama					4	23.380.000	1	1.200.000	1	6.531.100					2	7.731.100	50	33,07						
								33.890.836.900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50,26	31,82				
									Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
4.01.03.201	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)					85%	2.642.688.887	26,58	151.806.200	24,58	417.435.021	-	-	51,16	569.241.221	102,32	21,54							
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan					12	553.164.100	1	23.419.200	1	89.879.859	-	-	2	113.299.059	16,67	20,48							Bagian Ekbang
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (Rekomendasi)					2	424.773.200	0	9.660.000	1	54.255.675			1	63.915.675	50	15,05							
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (Rekomendasi)					4	87.085.950	1	8.279.200,00	1	24.117.208			2	32.396.408	50	37,20							

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra PD/ Renja PD sd Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (Rekomendasi)					2	41.304.950	0	5.480.000,00	1	11.506.976					1	16.986.976	50	41,13					
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan					8	112.218.640	1	6.679.500	1	22.914.004	-	-			2	29.593.504	25,00	26,37					Bagian Eksternal
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan (Rekomendasi)					12	59.152.450	3	-	3	18.482.650					6	18.482.650	50	31,25					
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan fisik (Rekomendasi)					12	53.066.190	3	6.679.500,00	3	4.431.354					6	11.110.854	50	20,94					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan (%)					100	1.884.245.847	31,33	113.781.500	23,33	282.105.668	-	-	54,66	395.887.168	54,66	21,01							Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang diproses oleh pokja dan pejabat pengadaan (paket)					12	782.143.300	3	31.591.500	3	107.929.800			3	139.521.300	25	17,84							
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha dan UMK (Aplikasi)					12	848.445.397	3	75.200.000	3	139.375.918			3	214.575.918	25,00	25,29							

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)				50	253.657.150	22	6.990.000	10	34799.950					22	41.789.950	44	16,47					
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan				8	93.060.300	1	7.926.000	1	22.535.490		-	-	-	2	30.461.490	25,00	32,73					Bagian Eksternal
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang dihasilkan (Rekomendasi)				2	46.685.850	0	7.926.000,00	1	7.945.430					1	15.871.430	1	34,00					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)				1	46.374.450	0	-	1	14.590.060					1	14.590.060	100	31,46					
							2.642.688.887									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		44,40	20,39					

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/ Renja PD s.d Tahun (0)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022 s/d 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penerimaan Jawaban
							Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
								Total Rp Realisasi		23.091.496.199		
					66.689.405.984		Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49,10	34,63			
							Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 lampiran Tabel 2.1 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) dari sub kegiatan yang dilaksanakan, rata-rata capaian kinerja 49,10% dari target sebesar 100,%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Berikut disajikan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Rata - Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	105,69	94,99	100	100	

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah yang diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu “Persentase Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretraiat Daerah” dan Realisasi pencapaian kinerja indikator sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Persentase Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretraiat Daerah

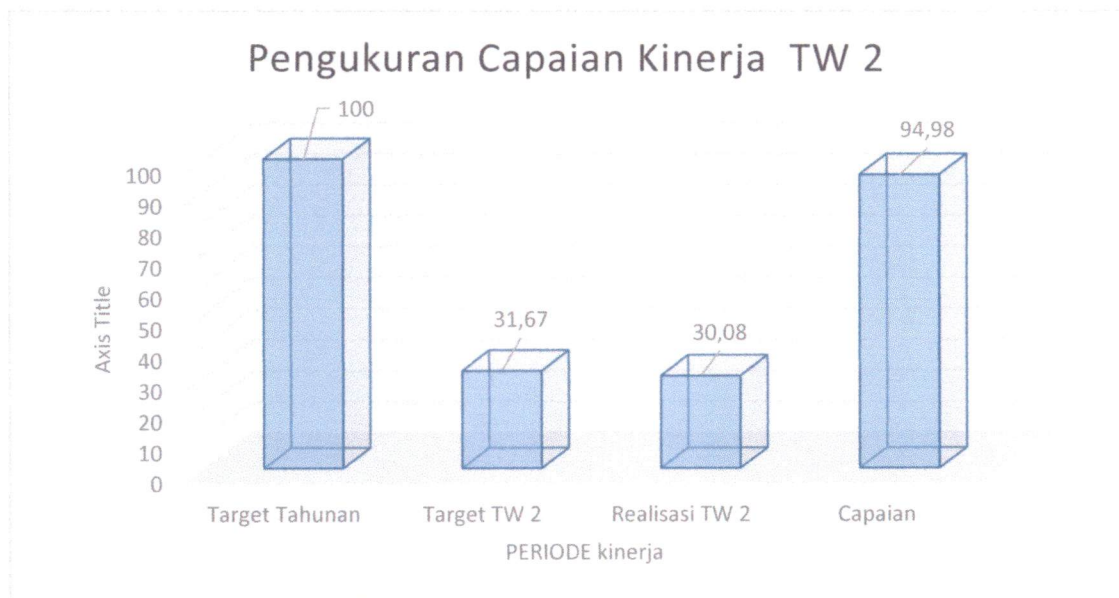
Indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretraiat Daerah” Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Sekretariat Daerah menggunakan Variabel *Capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretraiat Daerah* adalah Capaian indikator unit kerja/bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah yang mendukung pelaksanaan RB yang terdiri dari *Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)* (Bagian Pemerintahan), *Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai Ketentuan* (Bagian Kesra), *Indeks Reformasi Hukum (IRH)* (Bagian Hukum), *Persentase Pengendalian Inflasi Daerah* dan *Persentase Kebijakan Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dlaksanakan* (Bagian Ekbang), *Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP)* (Bagian PBJ), *Nilai SAKIP SETDA* (Bagian Perencanaan), *Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang memadai*, *Persentase BMD dalam Kondisi Baik*, *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan* (Bagian Umum), *Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi*, *Indeks Pelayanan Publlik*, *Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*, *Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan*, *Nilai Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah*, *Indeks BerAKHLAK RB*, (Bagian Organisasi) *Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi* (Bagian Prokopim).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur diperoleh dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan realisasinya.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Capaian Rata-Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	31,67	30,08	94,98
	Rata-rata Capaian Kinerja				94,98%

Grafik.1
Capain Klnerja TW 2



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator yang diperjanjikan Sekretariat Daerah yakni “*Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah*” pada Triwulan II belum mencapai target yakni berada pada **Capaian 94,98%** dengan **Realisasi 30,08%** dari **Target** yang direncanakan sebesar **31,67%**. angka ini menunjukkan kondisi di mana terdapat salah satu indicator kinerja pendukung yang tidak mencapai target yakni Nilai Sakip yang diampuh oleh Bagian Perencanaan sesuai yang telah direncanakan yakni pada realisasi 59,39 dari target yang direncanakan sebesar 70,85. Nilai Sakip sekretariat Daerah mengalami penurunan dari Nilai Sakip Tahun sebelumnya disebabkan adanya rekomendasi perbaikan oleh Kemenpan &RB yang belum sepenuhnya dilakukan perbaikan sampai akhirnya waktu evaluasi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW 1 Tahun 2024

Capaian Indikator kinerja pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama adalah **Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah** di mana ditargetkan 100% dan pada Triwulan II sebesar 31,67% dan didapatkan Realisasi sebesar 30,08% dengan demikian Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini adalah sebesar 94,98% sehingga dikategorikan dengan predikat **Baik**. hal ini menjadi salah satu pembuktian bahwa Sekretariat Daerah memiliki komitmen untuk mencapai Kinerja yang semakin baik.

Tabel 2.2.2
Pengukuran Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase rata-rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah	%	31,67	30,08	94,98
Persentase Capaian					94,98

Formula perhitungan:

Sasaran OPD	Indikator sasaran	Satuan	Cara Perhitungan
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah	%	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Jumlah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah
Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah	=		Capaian Nilai RB pada Sekretariat Daerah Jumlah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah 100 +10 +0+26,90+0+83,82+25+0+25 9 = 30,08%

❖ Indikator Kinerja **Sasaran Pendukung** yang mendukung pencapaian Sasaran Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah.

Tabel 2.2.3

No.	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi TW 2
	Bagian Pemerintahan				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.0051	3,0051	3,0051
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
2	Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	10%	10%
	Bagian Hukum				

No.	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi TW 2
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Fasitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	80	0.00	0.00
	Bagian Ekonomi Pembangunan				
4	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	2.50	2.50	2.16
		Persentase Kebijakan Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	100%	25%	25%
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP)	2.5	0.00	0.00
	Bagian Perencanaan				
6	Meningkatnya Kualitas SAKIP SETDA	Nilai SAKIP SETDA	70,85	70.85	59.39
	Bagian Umum				
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Setda	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang memadai	100%	25%	25%
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	25%	25%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	100%	25%	25%
	Bagian Organisasi				
8	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	88.18%	0.00	0.00
		Indeks Pelayanan Publik	2.35	0.00	0.00
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	83.84	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan	2 Dokumen	0.00	0.00
		Nilai Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	12.11	0.00	0.00
		Indeks BerAKHLAK RB	65.10	0.00	0.00
	Bagian Prokopim				
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi	100	25%	25%

❖ **Program pendukung pencapaian sasaran Capaian Reformasi Birokrasi**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Daerah
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penataan Organisasi
 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam

❖ **Faktor-Faktor yang mendukung Keberhasilan**

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada Triwulan II pada dasarnya masih dalam tahap proses pencapaian kinerja hal ini ditunjukkan beberapa sasaran pendukung yang masih berjalan kegiatannya sehingga pencapaian masih 0 (nol). Namun beberapa indikator sasaran pendukung sudah dapat diketahui pencapaiannya yang merupakan indikator berulang, sehingga dapat diidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yakni:

- a. Tercapainya kualitas layanan pada Sekretariat Daerah yang didukung dengan adanya supporting anggaran dan SDM yang dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat Daerah.

- b. Indikator keberhasilan juga didukung oleh capaian kinerja pada rekomendasi pelaksanaan pelaporan dalam mengintervensi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama dengan OPD serta Stakeholder terkait dalam mendukung pengendalian inflasi daerah dengan baik, sehingga pada Triwulan II ini tingkat inflasi sudah mengalami penurunan dan Indikator ini merupakan Indikator yang bersifat negative yang artinya adalah penurunan nilai berarti baik dan kenaikan nilai berarti buruk.
- c. Adanya Profesionalitas Pegawai Bagian Prokopim dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan yang disertai koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan.
- d. Adanya sumber dana pendukung kegiatan.

❖ **Faktor-Faktor Kendala dan Upaya mengatasi Solusi**

- a. Masih kurangnya pemahaman SDM aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan dokumen SAKIP.
- b. Lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait yang menjadi pengampuh bahan data penyusunan SAKIP
- c. Pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2023, Sekretariat Daerah belum menggunakan IKU yang memenuhi standar SMART, tetapi berbasis program dan kegiatan.
- d. Keterlambatan Pengimputan data SPM ke dalam aplikasi E-SPM dan E-LPPD serta Terdapat IKK indikator kinerja kunci (IKK) yang bukan merupakan kewenangan Daerah, misal Sungai, Danau, Pantai,
- a. Pelaksanaan lomba kelurahan pada aplikasi epdeskel yang perlu pembinaan lebih lanjut pada 3 kelurahan (malili, magani dan tomoni),
- b. Serta pelaksanaan batas desa yang memerlukan tenaga ahli G/S untuk penegasan dan pembahasan segmen batas desa;
- c. Proses layanan Bagian Hukum masih dilakukan secara manual, hal ini menyebabkan lambatnya proses fasilitasi;
- d. Belum ada SOP harmonisasi pembentukan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kanwil KemenkumHam terutama berkaitan dengan waktu penyelesaian.

Upaya Perbaikan dan mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan, antara lain:

- a. Melaksanakan konsultasi dan *coaching* penyempurnaan dokumen SAKIP kepada tenaga ahli terkait dengan melibatkan seluruh pengampuh indikator pendukung IKU lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Perlunya ditingkatkan koordinasi internal antara tim Penyusun SPM, LPPD dan Tim Koordinasi Kerja Sama Kabupaten dengan OPD Pengampu, OPD Teknis dan unit-unit terkait dalam hal penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kerja sama serta evaluasi pada pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati kedua belah pihak.

- c. Tenaga ahli gis (analisis toponimi dan analisis geografis) untuk pelaksanaan pembahasan segmen batas desa,
- d. Segera dibuat sistem aplikasi dalam memberikan layanan hukum;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham agar dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian hasil administrasi.

❖ **Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya**

Dalam pencapaian sasaran pendukung Sekretariat Daerah, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Belanja Honorarium Narasumber untuk kegiatan HLM (High Level Meeting) pengendalian inflasi daerah yang tidak digunakan karena kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
- Efisiensi anggaran pada Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan adanya Aplikasi Srikandi untuk memfasilitasi penyampaian Surat-Menyurat dari Perangkat Daerah kepada pejabat yang terkait dapat mengefisienkan penganggaran pada Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja ATK
- Efisiensi anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan pada Jabatan Eselon III yang dirangkap oleh Eselon IV pada Bagian Prokopim sehingga Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan dengan besaran Eselon IV.
- Pada Bagian Prokopim periode Triwulan I realisasi penyerapan anggaran masih belum optimal, namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tentu sangat berbeda hasilnya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kegiatan pimpinan itu di pusatkan di kabupaten sehingga tidak menggunakan anggaran daerah. Selain itu, dalam satu hari penuh, terkadang bisa sampai 4 (empat) kegiatan pimpinan yang terpenuhi, namun sesuai reguliasi perjalanan dinas, hanya satu kegiatan saja yang diakomodir setiap harinya. Hal ini tentu berdampak pada penyerapan anggaran.
- Pemeriksaan berkala terhadap Barang Milik Daerah berdampak terhadap masa manfaat/penggunaan yang lebih lama dan dapat mengurangi pengadaan yang baru.

Adapun yang dapat dilakukan untuk Efisiensi Sumber Daya

- Terdapat jabatan Eselon III yang masih kosong pada Bagian Prokopim yang diisi oleh Eselon IV, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
- Jumlah personil pada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hanya berjumlah 10 orang sementara yang direkomendasikan oleh LKPP idealnya 25 orang namun proses pengadaan barang/jasa tetap dimaksimalkan.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

- Dengan keterbatasan sumber daya dan tenaga ASN pada bagian umum khususnya tenaga dilapangan, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dilapangan dapat dilaksanakan melalui pelibatan tenaga supir.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

Tabel 2.2.4
Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2022 sd Tahun 2024

Tahun	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian
2022	Persentase rata-rata Capaian RB Setda	%	31,67	31,67	100
2023	Persentase rata-rata Capaian RB Setda	%	31,67	31,67	100
2024	Persentase rata-rata Capaian RB Setda	%	31,67	30,08	94,97

Grafik.2



Tabel di atas menyajikan perbandingan Persentase rata-rata Capaian RB Sekretariat Daerah dari Triwulan II dari Tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya dan menyajikan capaian yang menggambarkan penurunan kinerja kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup sekretariat Daerah.

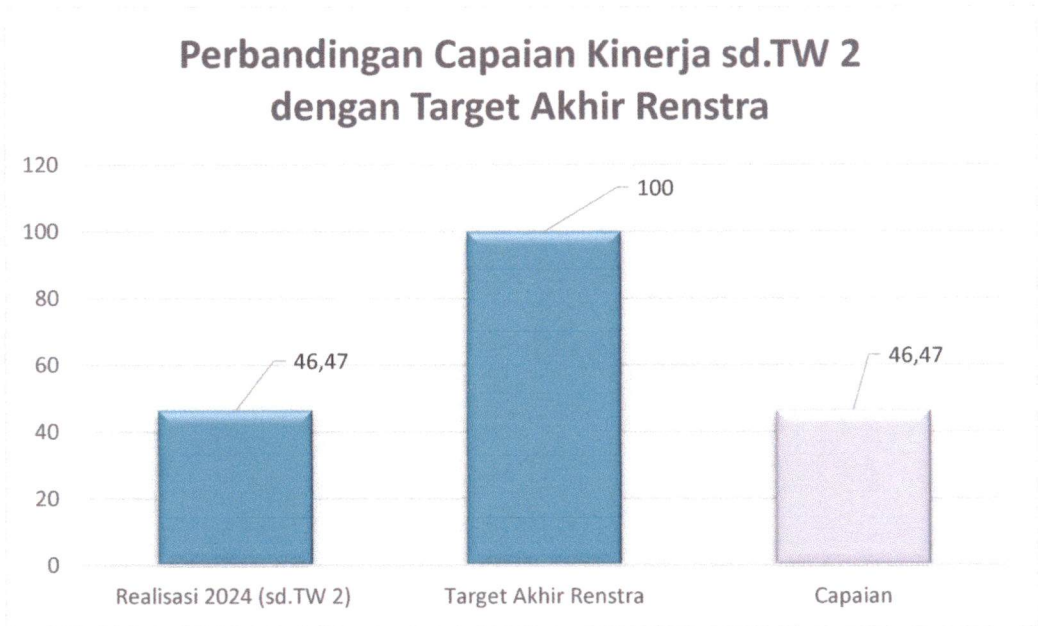
3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2024 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.5
Perbandingan Capaian TW II Tahun 2024 dengan Akhir Renstra Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sd. 2024 (sampai dengan TW 2)	Target Akhir Renstra	% Capaian
	Persentase Capaian RB Setda	Nilai	46,47	100	46,47

Grafik.3



Berdasarkan tabel di atas Sasaran Sekretariat Daerah “*Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah*” yang diukur melalui Indikator *Capaian Persentase Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah* memiliki target akhir Renstra dengan nilai 100%. Dengan demikian perbandingan capaian indikator ini pada awal Tahun 2024 ini Triwulan II belum mencapai target akhir Renstra dan jika dipersentasikan baru mencapai 46,47%.

4. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Sasaran sd.Triwulan II Tahun 2024 terhadap Capaian RB tingkat Nasional

Penjelasan perbandingan realisasi Indikator Kinerja sasaran sd.Triwulan II tahun 2024 dibandingkan dengan capaian RB Kabupaten Luwu Timur yang dinilai di tingkat Nasional pada tabel berikut:

Tabel 2.2.6
Perbandingan Capaian TW II Tahun 2024 dengan Perbandingan Level Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RB Setda (TW2)	Realisasi Kabupaten Luwu Timur (yang dinilai di tingkat Nasional)	% Capaian
	Persentase Capaian RB Setda	Nilai	46,47	Belum rilis	-

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Sekretariat Daerah “*Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Kinerja Penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah*” yang diukur melalui Indikator *Capaian Persentase Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah* belum bisa dibandingkan dengan Capaian di tingkat Nasional pada Triwulan II ini karena penilaian RB di tingkat Nasional akan rilis pada Triwulan ke III.

1. Capaian Kinerja Sasaran Pendukung

“*Nilai LPPD*” yang diampuh oleh Bagian Pemerintahan

Tabel 2.2.6.1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	3,0051	3,0051	100%

Sumber: Bagian pemerintahan

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditargetkan pada Triwulan II dapat terealisasi sesuai target, nilai tersebut dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan April, bertepatan pada perayaan hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor:100.2.1.7.7-6646 TAHUN 2023, tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capain tersebut, merupakan sebuah keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten, mengingat nilai yang diperoleh berada di urutan 148 se-Nasional dan urutan 12 di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan.

Kegiatan ini direncanakan target pada Tahun 2024 sebanyak 4 Rekomendasi, Rekomendasi ini sudah realisasi pada Triwulan I sebanyak 2 Rekomendasi yakni Rekomendasi penyusunan SPM dan penyusunan LPPD serta direncanakan 2 Rekomendasi lagi pada Triwulan ke IV sehingga pada Triwulan ke II tidak ditetapkan target. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.

Capaian kinerja dari masing-masing sub kegiatan:

- Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan melakukan monitoring administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, memfasilitasi kasus-kasus pengaduan serta memfasilitasi penataan administrasi kelurahan dan kecamatan dengan target selama setahun sebanyak 4 dokumen dan direncanakan pada Triwulan ke IV sehingga belum pencapaian kinerja hingga periode Triwulan ke II saat laporan ini dirilis.
- Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan memfasilitasi penyediaan dokumen penegasan batas wilayah, yang fokus kerjanya di wilayah batas desa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 45 tahun 2016) terkait Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Target selama setahun sebanyak 50 dokumen yakni Perbup Batas Desa hingga pada Triwulan ke II telah diperoleh realisasi sebanyak 5 (lima) dokumen atau dengan capaian kinerja yakni Perbup batas Desa Nikkel dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha, Desa Lakawali dan Kelurahan Malili Kecamatan Malili dan Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, kegiatan ini Merupakan subkegiatan yang memfasilitasi penyusunan dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2023 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023 melalui media online (Palopo.pos.) dan media cetak (surat kabar/koran). Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 4 Dokumen, sebanyak 3 dokumen dan telah diselesaikan pada triwulan I Telah dilakukan penyusunan Laporan LPPD Tahun

2023 dan SPM 2023. sehingga untuk triwulan II tidak ditetapkan target dan sementara dilakukan penyusunan RLPPD.

Tabel 2.2.6.2
Capaian kinerja kegiatan Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	0	0	0	Belum ditetapkan target kinerja pada periode ini
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen	0	5	10%	Meliputi perbup batas desa nikkel dan desa sorowako kecamatan nuha, desa lakawali dan kelurahan malili kecamatan malili dan desa wasuponda kecamatan wasuponda
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	0	0	0	Belum ditetapkan target kinerja pada periode ini
Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dikelola (Rekomendasi)						

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur Tahun 2024

2) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama.

Kegiatan ini ditetapkan target kinerja selama Tahun 2024 sebanyak 20 PKS dan diperoleh realisasi pada Triwulan I sebanyak 4 PKS yakni PT PLN UP3 Palopo, BPJS Ketenagakerjaan, BKD Prov Jawa Barat dan PT. Asuransi Jasa Indonesia dan pada Triwulan ke II sebanyak 4 PKS dari 10 PKS yang ditargetkan yakni Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dan Universitas Terbuka, Komando Distrik Militer 1403 Palopo yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini mencakup sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yakni bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Daerah lain atau Pihak lain. Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.

Capaian kinerja sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri, yang direncanakan target 4 (empat) Dokumen dalam tahun 2024 memiliki realisasi pada Triwulan ke I dan II masing-masing sebanyak 1 (satu) dokumen. Subkegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan kesepakatan bersama (Mou) dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga, yakni kesepakatan bersama dengan PT Assera Ferolindo Sejahtera terkait Rencana Kerja Sama pemanfaatan Lahan Pembangunan Pabrik pengolahan dan pemurnian komoditas Nikel dan kerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan menengah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah di Kabupaten Luwu Timur.

- Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, Subkegiatan ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam negeri. Output kegiatan ini adalah dilaksanakan evaluasi.

Tabel 2.2.6.3
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi kerjasama Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Fasilitasi Kerjasama dalam negeri	4 Dokumen	1	1	100	Dokumen kerja sama yang terealisasi Naskah Kerja Sama Pemkab Luwu Timur dengan PT.Aserra Ferolindo
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	4 Laporan	1	1	100	Evaluasi kerja sama yakni evaluasi Blk makassar, Pemkot Surakarta dan Perum Bulog Palopo
Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)						

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2024

“Indeks Reformasi Hukum”, yang diampuh oleh Bagian Hukum.

Tabel. 2.2.6.4
Pengukuran Capaian Kinerja
Bagian Hukum Setda Kab Luwu Timur
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II TAHUN 2024	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum	Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH)	76,39	80,00	76,39*	--

*hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) ditetapkan oleh Kemeterian Hukum dan HAM RI pada bulan November 2024, sehingga hasil realisasi TW II Tahun 2024 masih menggunakan data hasil capaian Tahun 2023.

Penilaian IRH dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *leading institution* dalam pelaksanaan kegiatan utama RB General (*mandatori*). Penilaian IRH mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Definisi IRH dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2022 adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian IRH menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

- 1) Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk harmonisasi regulasi dengan bobot 25%.
- 2) Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dengan bobot 25%.
- 3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review dengan bobot 35%.
- 4) Penataan Database peraturan perundang-undangan dengan bobot 15%.

Menteri Hukum dan HAM RI menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian IRH Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berupa Surat Keputusan Menteri dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel. 2.2.6.5
Kategori dan Predikat
Indeks Reformasi Hukum

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Capaian IRH sampai Triwulan II tahun 2024 masih menggunakan capaian tahun 2023. Capaian IRH tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai **76,39** dengan kategori **BB** Predikat **Baik**. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 50,35 dengan kategori CC predikat Cukup.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

kegiatan ini ditetapkan target kinerja sebanyak 100% koordinasi hukum yang dilaksanakan dan diperoleh realisasi kinerja sebesar 18,04% dari target TW 2 sebesar 20,74% dengan capaian kinerja 86,97% terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Hukum*.

Capaian kinerja masing-masing SubKegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
- Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan Penyelesaian permasalahan hukum. Kegiatan ini untuk

memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara ataupun pidana di tahap penyelidikan dan penyidikan.

- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan ini bertujuan mempublikasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Publikasi dilakukan melalui website Luwu Timur di jdih.luwutimurkab.go.id dan juga melalui Buku himpunan Peraturan daerah yang disampaikan kepada Kepala desa lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.2.6.6
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	keterangan
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum (Produk Hukum)	400 Dokumen	80	96	120	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya sampai pada triwulan II (triwulan I dan triwulan II) sebanyak 266 dokumen yang terdiri dari 6 Ranperda, 53 Ranperbup, dan 207 Rancangan Keppub. Dari 266 dokumen rancangan tersebut, sebanyak 217 Dokumen yang terdiri dari 1 Ranperda, 10 Ranperbup, dan 206 Rancangan Keppub, telah selesai disusun dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
2	Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	9 Kasus	2	1	50	Jumlah kasus atau gugatan baru pada Triwulan II kepada Pemerintah Daerah (Tergugat/Termohon) sebanyak 1 kasus yaitu laporan maladministrasi yang dilakukan FPR kepada Ombudsman. Kasus yang belum selesai dan masih difasilitasi (belum ada putusan berkekuatan hukum tetap) sebanyak 3 (dua) kasus yang terdiri dari 1) Gugatan perdata kepemilikan tanah lokasi Polindes Timampu Kecamatan Towuti (Tahun 2023). Pada tingkat pertama dan banding, Penggugat menang sehingga Tergugat melakukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini belum ada Putusan. 2) Gugatan STPD-BPHTB PT. Vale Indonesia Tbk atas 2 objek sengketa yaitu BPHTB Hak Guna Bangunan (HGB) Perumahan Karyawan dan BPHTB Hak Pakai (HP) Lapangan Golf. Sidang pemeriksaan telah selesai pada tanggal 4 Maret 2024 dan masih menunggu jadwal pembacaan Putusan Pengadilan Pajak. sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara oleh 7 (tujuh) Badan Usaha mengenai Izin Usaha Pertambangan (Tahun 2023). Pada tingkat pertama (PTUN) dan banding (PTTUN) Penggugat kalah sehingga Para Penggugat melakukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonan kasasinya pun telah ditolak oleh Mahkamah Agung.
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	400 Dokumen	80	76	95	Jumlah produk hukum daerah yang selesai ditetapkan sampai dengan triwulan II sebanyak 206 dokumen yang terdiri dari 1 Peraturan Daerah, 10 Peraturan Bupati dan 72 Keputusan Bupati. Semua produk hukum daerah tersebut telah didokumentasi sehingga diperoleh capaian kinerja sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum sebesar 100%. Target 150 dokumen pada triwulan I dan 80 dokumen pada triwulan II adalah target asumsi sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.
Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan						

Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2024

“Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai Ketentuan” diampuh oleh Baqian Kesejahteraan Rakvat (Kesra)

Kebijakan Kesejahteraan rakyat meliputi kebijakan dalam bidang kesejahteraan rakyat seperti kebijakan Hibah kepada Lembaga keagamaan dan Rumah Ibadah seperti Mesjid, Gereja dan Pura serta untuk pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Luwu Timur di seluruh Universitas baik untuk Mahasiswa Berprestasi maupun Mahasiswa kurang mampu. Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan menjadi indikator untuk mengukur peningkatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat akan berpengaruh pada capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat dalam pelayanan kepada Masyarakat sesuai kebijakan yang berlaku untuk peningkatan kualitas dan capaian kinerja Penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah.

Tabel. 2.2.6.7
Capaian Persentase Kebijakan Kesra yang dilaksanakan sesuai ketentuan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	10%	10%	100%

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

3) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini ditetapkan target selama tahun 2024 sebanyak 4 Rekomendasi dan diperoleh realisasi kinerja sebanyak 1 rekomendasi pada Triwulan ke II ini sesuai target yakni 1 rekomendasi sehingga capaian kinerja 100%, kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Kesejahteraan Rakyat*.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Pembinaan Keagamaan, Musabaqah Tilawatil Qura'an (MTQ), Pemberian Honorarium/Upah Rohaniawan/Petugas Keagamaan, Ibadah Haji, serta Pemberian Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah TW1: (6 Mesjid, 1 Gereja, 1 Pura) dan TW 2: (15 Mesjid, 2 Pura, 2 Gereja)
- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Luwu Timur yang Kurang Mampu yang ditargetkan

sebanyak 382 orang dari berbagai Universitas namun sampai Triwulan ke II belum ditargetkan kinerja karena pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada Triwulan ke IV.

- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat merupakan subkegiatan yang memfasilitasi pembinaan UKS dan pemberian Beasiswa terhadap Mahasiswa Berprestasi dan Penyelesaian Studi jumlah Beasiswa berprestasi yang ditargetkan kepada sebanyak 3181 orang dan Bantuan Penyelesaian Studi kepada 20 orang Mahasiswa S2 dan S3 namun kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan ke IV sehingga sampai pada Triwulan ke II belum ada realisasi kinerja atau capaian kinerja 0% namun telah dilakukan telah ditetapkan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja kegiatan bagian kesejahteraan rakyat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.6.8
Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	5 Dokumen	1	1	100%	Telah ditetapkan Keputusan Bupati Tentang penetapan kegiatan dan panitia MTQ Kabupaten Luwu Timur
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen	0	0	0	Target Kinerja di tetapkan dan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	0	0	0	Telah di tetapkan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan						

Sumber data : Bagian Kesra Setda Tahun 2024

“Nilai Inflasi Daerah” diampuh oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Realisasi kinerja pada bagian perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan menetapkan Target dan Realisasi pada Pengendalian Inflasi Daerah dalam hal ini dapat dijelaskan sebagaimana target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar $\pm 2,50\%$, pada Triwulan ke II didapatkan realisasi sebesar $\pm 2,16\%$ berbeda dengan kondisi pada Triwulan I Tahun 2024 yang menggambarkan realisasi sebesar $\pm 3,16\%$, sehingga dalam hal ini diperoleh capaian 115% Penyajian data realisasi pada tabel di bawah menggambarkan kondisi realisasi inflasi Kabupaten Luwu Timur yang masih mengacu pada rilis BPS Kota Palopo sehingga harga bahan pokok dalam kondisi stabil.

Tabel. 2.2.6.9
Capaian Nilai Inflasi Daerah

Tahun	Tingkat Inflasi Kabupaten	Tingkat Inflasi Sulsel	Tingkat Inflasi Nasional	Target Inflasi Nasional
2016	2,74	2,94	3,02	4±1%
2017	3,94	4,44	3,61	
2018	4,19	3,50	3,13	3,5±1%
2019	1,91	2,35	2,72	
2020	1,21	2,04	1,68	3,0±1%
2021	2,96	0,92	0,57	3,0±1%
2022	5,13	5,77	5,51	3,0±1%
2023	2,21	2,81	2,61	3,0±1%
2024 (TW2)	2,16	2,16	2,16	2,5±1%

“Persentase Kebijakan Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan” diampuh oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Realisasi kinerja Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan merupakan strategi dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan di daerah. Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan fisik di lapangan dilakukan untuk mengurangi jumlah kegiatan fisik yang mengalami kendala yang bisa menyebabkan keterlambatan pekerjaan fisik.

Persentase Kebijakan Perokonmian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan capaian yang baik yakni memenuhi target yang direncanakan sebesar 25 sehingga sampai dengan Triwulan ke II sudah mencapai 50%.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.

Kegiatan ini ditetapkan target sebanyak 4 (empat) Rekomendasi selama Tahun 2024, adapun target pada Triwulan ke II adalah 1 rekomendasi dan dapat realisasi sebanyak 1 rekomendasi sesuai yang ditargetkan sehingga Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 100%. Subkegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.6.10
Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian tahun 2024

N o	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisas i	Capaian	Keterangan
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1	1	100	Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	1	1	100	Tercapainya Laporan Triwulan II Pengendalian Inflasi Daerah
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	2 Dokumen	1	1	100	Pelaksanaan pelaporan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaporan Simpanan Pelajar (SIMPEL)
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan						

Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Luwu Timur Tahun 2024

- SubKegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD merupakan subkegiatan yang pelaksanaan kegiatannya menyangkut Evaluasi, Monitoring Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 4 BUMD dan satu Perseroda. Pada Triwulan ke II ini telah dilakukan 1 (satu) dokumen sesuai yang ditargetkan yakni penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sehingga capaian 100%.
- Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dalam sub kegiatan ini ada Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Pelaksanaan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah ini. Pada Triwulan ke II Kabupaten Luwu Timur telah mampu mengendalikan tingkat inflasi dari triwulan I yakni 3,16 turun menjadi 2,17 dengan beberapa langkah solutif yakni salah satunya pasar murah sehingga harga bahan pokok masih dalam kondisi stabil. Subkegiatan ini memiliki realisasi kinerja 1 Laporan sesuai dengan target kinerja yakni Laporan Triwulan II Pengendalian Inflasi Daerah.
- Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil adalah Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang mana Sub Kegiatan ini mempunyai beberapa hal tentang Koordinasi yang berkaitan dengan Percepatan Akses Keuangan di Daerah (TPAKD) yang mana terdiri dari koordinasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun capaian subkegiatan ini pada Triwulan ke II yakni 1 dokumen yakni Pelaksanaan pelaporan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaporan Simpanan Pelajar (SIMPEL).

2) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Kegiatan ini ditetapkan target kinerja sebanyak 4 (empat) Rekomendasi selama tahun 2024 dan didapatkan realisasi kinerja pada TW 1 dan TW 2 masing-masing 1 (satu) rekomendasi sesuai yang ditargetkan sehingga Capaian realisasi kinerja 100%. Faktor yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian adalah :

- Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Capaian realisasi kinerja sebesar 100% kegiatan ini mencakup realisasi serapan anggaran APBD 2024. Kegiatan ini bertujuan mengukur dan melaporkan realisasi serapan anggaran masing-masing SKPD dan secara umum mengetahui presentase realisasi serapan anggaran kabupaten Luwu Timur. Adapun capaian pada Triwulan ke II adalah Tercapainya Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/ Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan kegiatan ini mencakup Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kabupaten Luwu Timur, dengan capaian 3 laporan sesuai yang ditargetkan pada Triwulan ke II yakni Tercapainya Laporan Realisasi Pelaksanaan kegiatan Fisik (Konstruksi).

3) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam,

Kegiatan ditetapkan target sebanyak 4 (empat) Rekomendasi selama Tahun 2024, namun pada Triwulan ke II target kinerja 1 rekomendasi dan diperoleh realisasi 1 (satu) rekomendasi sesuai dengan yang ditargetkan sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan ini mencakup 2 (dua) subkegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Rincian kedua subkegiatan ini sebagai berikut:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah merupakan suatu Sub Kegiatan Capaian maksimal dengan output berupa Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Semester I Tahun 2024.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah merupakan sub kegiatan Capaian maksimal dengan kegiatan Dokumen Lelang WIUPK Blok Bulubalang, WIUPK Blok Lingke Utara dan WIUPK Blok Pongkeru BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Tabel 2.2.6.11
Capaian Kinerja Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Rekomendasi	1	1	100	Dokumen Pelaksanaan Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Semester I Tahun 2024
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi	0	1	100	Dokumen Lelang WIUPK Blok Bulubalang, WIUPK Blok Lingke Utara dan WIUPK Blok Pongkeru BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda)
Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan						

“Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP)” diampuh oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/Pemda disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November setiap tahunnya sehingga Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 pada Triwulan II belum rilis dan akan rilis pada Triwulan IV, namun Tahun 2023 diperoleh dengan nilai 66,71 (kategori cukup) yang mana ditargetkan 65,01. Hal ini didasari capaian pengukuran tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional baik dari segi kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ), Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pemanfaatan Sistem Pengadaan mengalami perbaikan cukup baik.

Penilaian indeks tata kelola pengadaan telah dilakukan terhadap UKPBJ Luwu Timur sejak Tahun 2020, namun penetapan ITKP sebagai Indikator Kinerja bagian Pengadaan barang/Jasa baru dilakukan pada tahun 2023 di mana telah tergambarkan target dan capaian ITKP.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.

Kegiatan ini ditetapkan target kinerja sebanyak 100% selama Tahun 2024, dan ditargetkan pada Triwulan ke II sebesar 21,62% dan diperoleh realisasi kinerja sebesar 23,33% sehingga capaian 107,92%. Kegiatan yang dilaksanakan oeh *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)*. Adapun subkegiatan pendukung capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- Sub kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, merupakan suatu kegiatan pemilihan penyedia dalam bentuk pelaksanaan tender dengan target 12 dokumen dan

target pada Triwulan ke II sebanyak 3 dokumen, dari target ini diperoleh realisasi kinerja sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah Tercapainya realisasi laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Pengelolaan Layanan pengadaan secara Elektronik merupakan subkegiatan yang menangani layanan pengelolaan teknologi dan system informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Untuk triwulan ke II diperoleh realisasi kinerja sesuai target kinerja yakni sebanyak 3 (tiga) dokumen yakni Dokumen *Summary Report* Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan serta pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Output pada subkegiatan ini adalah Jumlah Orang/ASN yang mengikuti pembinaan dan Advokasi PBJ yang mana sampai dengan Triwulan II sebanyak 10 Orang sesuai yang ditargetkan sehingga capaian kinerja adalah 100%.

Tabel 2.2.6.12
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	3	3	100%	Tercapainya realisasi laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik	12 Dokumen	3	3	100%	Dokumen Summary Report Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	Jumlah Orang/ASN yang mengikuti pembinaan dan Advokasi PBJ yang mana sampai dengan Triwulan II sebanyak 10 Orang
Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan						

Sumber data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

“Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang memadai” diampuh oleh Bagian Umum

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang memadai, Capaian indikator ini adalah 25% dari target 25% sehingga Capaian Kinerja sebesar 100%. Adapun output dari indikator ini adalah sebagai berikut:

Sebagai salah satu bagian Layanan dalam Sekretariat Daerah, Layanan kepegawaian merupakan suatu tindakan dalam penanganan urusan kepegawaian penyediaan Jasa Komunikasi dan jasa Pelayanan Umum. Indikator Kinerja “Layanan Administrasi Perkantoran yang memadai” merupakan suatu upaya/kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran di Lingkup Sekretariat Daerah. Layanan Administrasi Perkantoran meliputi 4 (empat) yaitu :

- a. Layanan Kepegawaian yang mencakup penanganan Cuti ASN, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Presensi, Disiplin Pegawai, Kontrak Upah Jasa dan E-Kinerja
- b. Layanan pemenuhan kebutuhan Logistik kantor;
- c. Layanan pemenuhan Jasa Komunikasi, Air, Listrik;
- d. Layanan Jasa Pelayanan Umum;
- e. Layanan penyediaan penerangan Kantor.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini mencakup Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Bimbingan Teknis Perundang-undangan, dengan realisasi kinerja 24,50% dari target TW II sebesar 15%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Faktor pendukung capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.13
Capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahun	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	3 Dok	3	100	Dokumen Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Gaji Berkala, Cuti ASN, Kenaikan Pangkat, Presensi)
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	0	0	0	Tidak ada target
3	Bimbingan Teknis Perundang-undangan	25 Orang	5 Orang	6 Orang	120	6 orang PNS
Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2024

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada Kegiatan ini realisasi kinerja sebesar 21,76%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang Sangat Baik, adapun Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu bersifat disiapkan untuk tamu Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.14
Capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 Paket	10	13	130	Paket terdiri dari penyediaan lampu, broker steker, sespen,stok kontak, isolasi, kabel, Steker, Kabel supreme,klem supra, baterai alkaline, baterai A3 dan A2, upah jasa instalasi listrik.
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	2	1	50	Tersedianya Plakat
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	0	0	0	Tidak ada target pada Tw.II
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52 Paket	13	13	100	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas, Racun Rumput, Bahan pakai habis kebersihan, Suku cadang mesin babat, Alat/bahan kegiatan Kantor, Jasa tenaga pelayanan umum (sewa kursi, sewa tenda).
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Paket	3	3	100	Cetak stempel, Fotocopy dan Jilid Spiral
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1980 Dokumen	495	495	100	Dokumen 11 Jenis surat kabar yaitu Batara Pos, Berita Kota Mks, Fajar, Kompas, Palopo Pos, Rakyat Sulsel, Seruya,Sindo, Sinyal Tajam, Tribun Timur, Upeks
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3	3	100	Laporan jumlah makan minum tamu yang difasilitasi sebanyak 3127 porsi
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	100	Laporan penyelenggaraan Rakor dan konsultasi SKPD berjumlah 595 kali
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2024

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dengan target 100% pada Tahun 2024 dan diperoleh realisasi kinerja sebesar 25% dari target 25% pada Triwulan ke 2, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor hal ini disebabkan target untuk

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak tercapai disebabkan terdapat kekosongan tenaga Upah Jasa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.
Faktor pendukung capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.15
Capaian kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3	3	25%	Laporan jumlah surat masuk dan nota dinas 1855, surat keluar 250 surat yang diadmnistrasikan.
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3	3	25%	Laporan pembayaran rekening Air, Listirk, Telepon, Wifi, TV Kabel bulan April, Mei, Juni
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3	3	25%	Laporan pembayaran jasa tenaga administrasi 6 orang, Tenaga operasional lapangan 1 orang, Jasa Kebersihan Kantor 9 orang, Jasa Tenaga Sopir Kantor dan Mess Mks 13 orang,Sopir Mess Jakarta 2 orang, dan bahan/alat perlengkapan kantor
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						

“Persentase BMD dalam Kondisi Baik” diampuh oleh Bagian Umum

Persentase Barang Milik Daerah yang memadai merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Sekretariat dalam mencapai tujuan organisasi. meliputi :

- a. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya;
- c. Pengadaan gedung kantor; dan
- d. Pemeliharaan Gedung kantor.

Capaian output dalam indikator ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan dan dipelihara untuk menunjang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Sekretariat untuk mencapai tujuan organisasi, Target yang ditetapkan pada Triwulan kedua ini adalah sebesar 25% dan didapatkan realisasi sebesar 25% sehingga Capaian sebesar 100%.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini merupakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 0% disebabkan disebabkan belum adanya penetapan pejabat pembuat komitmen sehingga berdampak pada penyediaan pengadaan yang terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya, pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Faktor pendukung capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.16
Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Pengadaan Mebel	104 Unit	0	0	0	Belum adanya penetapan pejabat pembuat komitmen sehingga berdampak pada penyediaan pengadaan
2	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	34 Unit	0	0	0	Belum adanya penetapan pejabat pembuat komitmen sehingga berdampak pada penyediaan pengadaan
3	pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Unit	0	0	0	Belum adanya penetapan pejabat pembuat komitmen sehingga berdampak pada penyediaan pengadaan
Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan						

2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditargetkan pada Triwulan II sebesar 22,54% diperoleh realisasi kinerja sebesar 22,28%, dari yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar 100%. Capaian ini dalam kategori Baik, Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.17
Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi TW 2	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40 Unit	10	10	100	Pemeliharaan berupa Service, Penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK kendaraan Dinas KDH dan WKDH serta Kendaraan Dinas Staf Ahli dan Asisten
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	1	1	100	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan (Truk) penggantian suku cadang, dan pembayaran STNK bus Pemda
3	Pemeliharaan Meubel	77 Unit	1	0	0	Pemeliharaan kursi futura, Meja kerja, tempat tidur dan sofa Rujab Bupati,
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130 Unit	30	30	100	pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga seperti Alat Pendingin suku cadang dan Jasa Service AC, Gendet Rumah Jabatan, Pemanas Air, serta alat kantor seperti Laptop, PC, Printer dan Scanner
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	3	3	100	Pemeliharaan Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Kantor Bupati dan Rujab Sekda.
Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik (%)						

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan” diampuh oleh Bagian Umum

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan merupakan bagian dari layanan dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan KDH, WKD dan Sekda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator Kinerja “Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan” merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan pemenuhan rumah tangga pimpinan dalam rangka menunjang tugas pimpinan yang meliputi:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH;
- d. Penyediaan anggaran Medical Check up bagi KDH dan WKDH;
- e. Penyediaan Gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
- f. Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH;
- g. Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat Daerah

Pengukuran capaian kinerja indikator kerja ini 100% dengan melihat fasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dimaksud.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

2) **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kegiatan ini ditargetkan terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi kinerja sebesar 31,25% dari target 43,75% pada Triwulan ke II. hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan medical checkup KDH/WKDH belum dilaksanakan yang disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati masih menyesuaikan dengan kesempatan Pimpinan serta Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH dalam tahap koordinasi dengan Pimpinan dan penyedia dan penyedia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.

Capaian Kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.18
Capaian kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2	2		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9 paket	9	0		Belum dilaksanakan
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	2	0		Belum dilaksanakan
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2	2		Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Mess Pemda dan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH, Pembayaran upah jasa Ajudan KDH 1 orang, Tenaga Supir KDH/WKDH 4 orang, dan Perjalanan dinas Bupati beserta Ajudan dan Sopir Bupati.
Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						

3) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Kegiatan ini dengan realisasi kinerja sebesar 20,63% dari target 26,19% dan 100% target setahun 2024, capaian ini dalam kategori Baik. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*.
Faktor pendukung capaian kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah:

Tabel 2.2.6.19
Capaian kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket	2 Paket	66,67	Belanja peralatan dan perlengkapan makan minum Rujab, Belanja Rumah Tangga, Gaji Pramusaji 6 orang, CS 1 orang
2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket	2 Paket	66,67	Belanja peralatan dan perlengkapan makan minum Rujab, Belanja Rumah Tangga, Gaji Pramusaji 2 orang, CS 4 orang
3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	7 Paket	2 Paket	2 Paket	100	Belanja Peralatan makan minum Mess, Belanja RT Mess Mks dan Jakarta, Jasa petugas piket Mess, Jasa Laundry, Upah Jasa CS Mess MKS 3 orang, CS Mess Jakarta 3 orang, Upah jasa Pramusaji Rujab Sekda,CS Rujab Sekda dan Mess, luran kebersihan Mess, PBB Mess Pemda
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess						

“Nilai SAKIP Sekretariat Daerah ”, yang diampuh oleh bagian perencanaan dan Keuangan.

Tabel. 2.2.6.20
Capaian Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

No	URAIAN	TARGET (TW II)	REALISASI (TW II)	CAPAIAN (%)
1.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (Nilai SAKIP Tahun 2023).	70,85	59,39	83,82

Sumber: Bagian perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas bahwa pada Triwulan II indikator yang diperjanjikan oleh Bagian Perencanaan ditetapkan target Nilai sebesar 70,85 sedangkan realisasi mendapatkan nilai sebesar 59,39. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak mencapai target disebabkan adanya perubahan IKU atas rekomendasi oleh Kemenpan & RB namun perbaikan dokumen perencanaan belum sepenuhnya dilakukan sampai batas waktu evaluasi SAKIP sehingga masih banyak kekurangan yng butuh perbaikan atas perubahan tersebut dan membutuhkan waktu dalam proses penyusunan. Sehngga dalam hal ini nilai realisasi diperoleh capaian 83,82%.

Hasil Nilai SAKIP ini merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup 5 (lima) komponen besar yaitu manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD, Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dimana kegiatan ini menghasilkan dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

Tabel 2.2.6.21
Capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah TW II Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	0 Dok	0 Dok	0	Realisasi Kinerja pada TW III
2	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0	Realisasi Kinerja pada TW III
3	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0	Realisasi Kinerja pada TW III
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dok	2 Dok	2 Dok	100	Output kegiatan adalah Laporan Kinerja TW 1 TA.2024, LAKIP Perbaikan Tahun 2023 dan Data RKPD TW 1
Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu		100%				

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2024

*Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah
TW2 Tahun 2024*



2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

Capaian Kinerja pada Triwulan II dari masing-masing subkegiatan yang berkontribusi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut adalah:

Tabel 2.2.6.22
Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah TW II Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang	96 Orang	85 Orang	87,50	80 orang PNS dan 4 orang PPPK dan direncanakan untuk kekosongan beberapa jabatan di Sekretariat Daerah yakni, Eselon III 1 (satu) orang, Eselon IV 2 (dua) orang, dan JF 4 (empat) orang
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	Dok. Pencairan LS Hibah, Dok Pencairan LS Upah Jasa, Dok Pencairan LS Pemeliharaan, Dok GU, Dok TU dan Dok. pencairan LS Honorarium.
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Lap.	10 Lap.	3 Lap.	100	Lap. LRA Triwulan 1, Lap. LRA Bulan April dan LRA Bulan Mei
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah						

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2024

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD di mana indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan yakni yakni Laporan Inventarisasi BMD Triwulan 1 Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup penatausahaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target 12 Laporan selama Tahun 2024 dan diperoleh realisasi kinerja 3 Laporan pada peiode Triwulan ke II ini, di mana indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

“Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi” diampuh oleh Bagian Organisasi

Persentase penyederhanaan struktur organisasi merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan.

Persentase penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan agar terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Capaian pelaksanaan persentase penyederhanaan struktur organisasi baru dilaksanakan pada Tahun 2023

dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 memperoleh nilai 88.16 dengan predikat BAIK sedangkan capaian persentase penyederhanaan struktur organisasi pada Triwulan II Tahun 2024 belum diketahui dan ditargetkan pada Triwulan ke IV Tahun 2024.

"Indeks Pelayanan Publik" diampuh oleh Bagian Organisasi

Untuk indikator ini merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu instansi pemerintah ke setiap Unit Lokus Evaluasi (ULE) dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Indeks pelayanan publik di tahun 2023 nilai IPPnya 2,35/C-, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IPP tahun 2022 senilai 3,25/B- dan tahun 2021 senilai 3,02/B- ini disebabkan karena ULE di tahun 2023 tidak sama dengan ULE pada tahun 2022 dan 2021 sedangkan untuk capaian pada Triwulan II Tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik belum rilis dan akan rilis pada Triwulan ke IV Tahun 2024.

"Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik" diampuh oleh Bagian Organisasi

Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan penilaian yg dilakukan oleh ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik untuk mengukur kualitas pelayanan, kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2023 adalah 83,34 masuk dalam zona hijau, kategori B dengan opini kualitas tinggi jika dibandingkan dengan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 72,25 zona kuning, kategori C, opini kualitas sedang. artinya ada kenaikan pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di thn 2023 sedangkan pada Tahun 2024 ini penilaian kepatuhan standar pelayanan publik akan rilis pada Triwulan ke IV Tahun 2024 sehingga saat ini belum ada capaian.

"Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan" diampuh oleh Bagian Organisasi

Dokumen ketatalaksanaan yang ditargetkan di tahun 2024 ada 2 yaitu: Terkait dengan Laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Perbup Sistem Kerja, namun untuk pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan ke 3 (tiga) sehingga saat ini pada sampai pada Triwulan II ini masih dalam proses penetapan perbup. Sedangkan untuk Laporan IKM dalam proses pengumpulan data dari Perangkat Daerah terkait.

"Nilai Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah" diampuh oleh Bagian Organisasi

Untuk indikator ini merupakan hasil perbaikan/penyempurnaan indikator kinerja yg lebih relevan dan terukur, sehingga jika melihat indikator pada tahun sebelum belum ada,

namun untuk realisasi dapat dilihat pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yg dikeluarkan oleh kementerian panrb.

Untuk capaian tahun 2023 adalah 12,11 artinya ada kenaikan nilai pelaporan kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 12,02 dan tahun 2021 sebesar 11,91. Sedangkan Capaian Tahun 2024 nilai pelaporan kinerja akan rilis pada Triwulan ke IV Tahun 2024, sehingga pada Triwulan II saat ini belum ada capaian dan masih dalam proses kegiatan.

"Indeks BerAKHLAK RB" diampuh oleh Bagian Organisasi

untuk indikator ini merupakan hasil perbaikan/penyempurnaan indikator kinerja yg lebih relevan dan terukur, sehingga jika melihat indikator pada tahun sebelum belum ada, begitupun dengan realisasi tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan bagian dari perubahan arah kebijakan RB tahun 2022 yang mana hasil baru bisa diukur ditahun 2023.

Capaian kinerja indeks berakhlak Tahun 2024 pada Triwulan II ini belum ada disebabkan nilai indeks berakhlak akan rilis pada Triwulan ke IV Tahun 2024, namun dapat diberikan gambaran Capaian kinerja indeks berakhlak tahun 2023 adalah 65,1, tdk ada perbandingan untuk tahun sebelumx. Capaian ini diukur berdasarkan hasil survei internalisasi budaya kerja pemerintah daerah, bagaimana. pemahaman dan penerapan budaya kerja di perangkat daerah.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian IKU yang diampuh oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan ini memiliki Indikator yakni *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*, sampai dengan Triwulan ke II belum ada realisasi kinerja karena target kinerja direncanakan pada Triwulan ke 4. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan yakni Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Organisasi*.

Sub kegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Penataan Organisasi adalah:

Tabel 2.2.6.23
Capaian Kinerja Penataan Organisasi Triwulan II Tahun 2024

No.	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan 2	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	2	1	50%	Telah ditetapkan Perbup Bapperida
2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	2 Laporan	0	0	0	tidak ada target di tw.2
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0	0	0	target capaian kinerja pada kegiatan ini diakhir tahun berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birorkasi dari Kementerian PANRB
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	0	0	0	Terlaksananya kegiatan Coaching Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1	1	1	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda Tahun 2023
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan						

Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2024

“Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi”
diampuh oleh Bagian Protokol dan Kepemimpinan

Meningkatnya kualitas layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan merupakan kondisi dimana terselenggaranya kegiatan perencanaan, pengaturan, pengoordinasian dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dibidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Triwulan ke II persentase layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan terpenuhi sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dijelaskan bahwa pada setiap kegiatan Pimpinan yang dikerjakan terdapat dua fungsi yang berjalan yakni fungsi protokoler dan fungsi pendokumentasian tugas pimpinan yang nantinya akan dihasilkan dalam bentuk publikasi kegiaiatan pimpinan di website maupun media social, sementara untuk kegiatan fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan semua elemen terkait untuk menyiapkan kegiatan pimpinan yang salah satu hasilnya berupa Pidato atau Sambutan Kepala Daerah.

Tabel 2.2.6.24
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi	25	25	100%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kegiatan protokoler, komunikasi dan dokumentasi yang ditargetkan untuk tahun 2024 ini ditargetkan 25% dan realisasi 25% sehingga capaian 100%.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Iku adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini direncanakan Target 765 kegiatan pada Tahun 2024 dan pada Triwulan ke II realisasi sebanyak 180 kegiatan dari target 180 kegiatan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan realisasi kinerja kegiatan ini mencapai target 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*.

Tabel 2.2.6.25
Capaian kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Triwulan ke II Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Fasilitasi Keprotokoleran	255 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100	terlaksananya kegiatan pelayanan protokoler pimpinan dan pengaturan acara
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	terlaksananya kegiatan komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan pimpinan
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	255 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100	terlakasannya kegiatan pedokumentasian dan publikasi kegiatan pimpinan
Jumlah Kegiatan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan yang dihasilkan						

Sumber data : Bagian Prokopim SETDA Tahun 2024

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Perangkat Daerah beserta perkembangannya terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Isu-isu strategis Sekretariat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan fungsi koordinasi karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perwujudan Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan pengelolaan keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN.
2. Perwujudan Good Government melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik.
3. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan stakeholders, terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Belum optimalnya penyelesaian pembentukan produk hukum daerah akibat terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM di Bagian Hukum dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.
5. Masih kurangnya pemahaman dan koordinasi Perangkat Daerah terkait kegiatan yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum.
6. Masih tingginya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
7. Belum optimalnya pengendalian Inflasi daerah Kabupaten Luwu Timur melalui tim TPID dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.
8. Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terkait Sumber daya Alam (SDA).

10. Belum optimalnya penataan kelembagaan disebabkan karena seringnya terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat.
11. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi secara berkala.
12. Belum optimalnya proses pemilihan penyedia baik tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung maupun e-purchasing pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
13. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terhadap Pimpinan.
14. Peningkatan Kedisiplinan dan Pengembangan SDM Aparatur lingkup Sekretariat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rencana kerangka ekonomi daerah;
2. Program prioritas pembangunan daerah dan;
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Berikut review rancangan awal RKPD Kab. Luwu Timur dan analisa kebutuhan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tabel berikut :

**TABEL 2.3 (Tabel T.C 31 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN Tahun 2024
SEKRETARIAT DAERAH**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekretariat Daerah				66.689.405.984	Sekretariat Daerah				77.549.615.984	
	Belanja				66.689.405.984	Belanja				77.549.615.984	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	30.155.880.197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	32.255.980.197	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	183.190.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	178.435.500	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	68.775.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.453.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	8.523.500	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	6.750.000	

**Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	91.987.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	6 dok	94.387.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	12.904.649.439	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	12.672.647.951	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang	12.584.849.139	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	86 Orang	12.364.847.651	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	261.890.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi (Kegiatan)	21 Kegiatan	249.890.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	57.910.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	15 dok	57.910.300	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	108.533.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	108.533.200	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	108.533.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Laporan	108.533.200	
4.	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	29.300.000	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	29.300.000	
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	29.300.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	12 Laporan	29.300.000	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	318.208.575	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	335.008.575	
5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bag. Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	82.468.575	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bag. Umum	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12 Dok	79.268.575	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	116.510.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan (Orang)	12 Orang	116.510.000	
5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Bag. Umum	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	25 Orang	119.230.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Bag. Umum	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	21 Orang	139.230.000	
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	3.073.344.605	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	3.756.989.005	
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bag. Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	78.995.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bag. Umum	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	9 Jenis	78.995.000	
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	142.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Umum	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	7 Jenis	142.450.000	
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bag. Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	345.840.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bag. Umum	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Unit)	6 Jenis	445.840.000	
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	416.601.805	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Umum	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	8 Jenis	411.454.205	
6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	53.570.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Umum	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	9 Jenis	53.570.000	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Dokumen	191.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	1980 Eksemplar	210.000.000	
6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bag. Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	457.025.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bag. Umum	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	12000 Orang	567.025.000	
6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.387.702.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Umum	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	540 Kali	1.847.654.800	
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bag. Umum	Persentase Pengadaan BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	1.515.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bag. Umum	Persentase Pengadaan BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	2.201.417.788	
7.1	Pengadaan kendaraan Dinas Perorangan/Perorangan	Bag. Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan kendaraan Dinas Perorangan/Perorangan	Bag. Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Perorangan yang diadakan	1 Unit	466.600.000	
7.2	Pengadaan Mebel	Bag. Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit	248.000.000	Pengadaan Mebel	Bag. Umum	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	33 Unit	249.000.000	
7.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	529.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	65 Unit	748.317.788	
7.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bag. Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	737.500.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bag. Umum	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	3 Unit	737.500.000	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	1.862.658.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	1.809.858.684	
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.058.684	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Umum	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	4800 Surat	21.058.684	
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bag. Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.091.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bag. Umum	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	450 Rekening	1.038.800.000	
8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Umum	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	91 Orang	750.000.000	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	2.598.395.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	2.648.995.000	
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	872.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Umum	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	45 Unit	923.060.000	
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Umum	Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya	3 Unit	46.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Umum	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3 Unit	46.500.000	
9.3	Pemeliharaan Mebel	Bag. Umum	Jumlah mebel yang dipelihara	25 Unit	97.820.000	Pemeliharaan Mebel	Bag. Umum	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	119 Unit	97.820.000	
9.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	64 Unit	261.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	175 Unit	261.490.000	
9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bag. Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.320.125.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bag. Umum	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	10 Unit	1.320.125.000	
10.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100%	3.363.580.394	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100%	4.323.582.394	
10.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	791.956.394	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (Orang)	2 Orang	791.956.394	
10.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	77.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang diadakan (Stel)	16 Stel	77.000.000	

**Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana (%)	100%	60.000.000	
10.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2.394.624.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan	3.394.626.000	
11.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bag. Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess (%)	100%	1.775.100.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bag. Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess (%)	100%	1.767.600.000	
11.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	860.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Paket)	3 Paket	860.000.000	
11.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 paket	600.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil Kepala Daerah (Paket)	3 Paket	600.000.000	
11.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bag. Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 paket	315.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bag. Umum	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan Mess (Paket)	5 Paket	307.600.000	
12.	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	65,85%	1.117.363.300	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Persentase OPD yang meningkat nilai saki (%)	65,85%	1.117.305.600	
12.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	311.183.300	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Penataan Kelembagaan (Perangkat Daerah)	39 OPD	311.183.100	
12.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	171.048.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi pelayanan publik (Perangkat Daerah)	15 OPD	171.025.500	
12.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	226.566.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39 OPD	226.531.000	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								(Perangkat Daerah)			
12.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	106.236.500	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana (Laporan)	2 Laporan	106.236.500	
12.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	302.329.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 dok	302.329.500	
13.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang dihasilkan	765 kegiatan	1.306.306.500	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah Keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang difasilitasi	765 kegiatan	1.306.306.500	
13.1	Fasilitasi Keprotokolan	Bag. Prokopim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	255 Laporan	621.025.500	Fasilitasi Keprotokolan	Bag. Prokopim	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	255 Kegiatan	621.025.500	
13.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	255 Laporan	142.309.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	255 Kegiatan	142.309.000	
13.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	542.972.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ dipublikasikan	255 Kegiatan	542.972.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKPD	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100%	33.890.836.900	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SKPD	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100%	42.408.736.900	
14.	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	485.279.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	469.349.000	
14.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	140.642.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasi pemerintahannya	14 Kel/Kec.	117.612.000	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
14.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	175.303.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Peta yang dihasilkan	25 Peta	148.513.000	
14.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	169.334.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah Laporan pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	3 Laporan	203.224.000	
15.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	32.407.310.400	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	40.983.850.400	
15.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	15.983.650.700	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spritual yang difasilitasi	7 kegiatan	20.606.710.700	
15.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	1.813.952.300	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi	2 Kegiatan	1.795.352.300	
15.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	14.609.707.400	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi	2 Kegiatan	18.581.787.400	
16.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan (%)	90%	896.441.500	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan (%)	85%	855.801.500	
	Fasilitasi Penyusunan	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum	400	205.755.600	Fasilitasi Penyusunan	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum yang	400 Produk	205.755.600	

**Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Produk Hukum Daerah		Daerah yang Disusun	Dokumen		Produk Hukum Daerah		ditetapkan (Perda/Perbup/SK)	Hukum		
16.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	524.577.500	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum	Jumlah laporan pelaksanaan aksi ham yang disusun	4 Laporan	483.937.500	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	166.108.400	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah desa binaan sadar hukumb (Desa)	11 Desa	166.108.400	
17.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan	20 PKS	101.806.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)	9 PKS	99.736.000	
17.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	78.426.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag. Pemerintahan	Jumlah MOU dalam Negeri yang difasilitasi	15 MOU	77.556.000	
17.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Bag. Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	23.380.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Bag. Pemerintahan	Jumlah Kerja sama yang dievaluasi	2 MOU	22.180.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SKPD	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (Rekomendasi)	100%	2.642.688.887	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SKPD	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (Rekomendasi)	80%	2.884.898.887	
18	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	12 Rekomendasi	553.164.100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	12 Rekomendasi	521.424.100	
18.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bag. Ekbang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	424.773.200	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	388.033.200	
18.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag. Ekbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	87.085.950	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	92.085.950	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
18.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bag. Ekbang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	41.304.950	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	41.304.950	
19.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan (rekomendasi)	8 Rekomendasi	112.218.640	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan (rekomendasi)	8 Rekomendasi	150.428.640	
19.1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	59.152.450	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan pembangunan fisik (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	59.152.450	
19.2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	53.066.190	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	91.276.190	
20.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	100%	1.884.245.847	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	100%	2.083.245.847	
20.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	782.143.300	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat Pengada (Paket)	800 Paket	1.026.623.300	
20.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	848.445.397	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK (aplikasi)	7 Aplikasi	763.305.397	
20.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang/Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	253.657.150	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang/Jasa.	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan pengadaan barang dan Jasa (Perangkat daerah)	61 OPD	293.317.150	
21.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Ekbang	Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan (Rekomendasi)	8 Rekomendasi	93.060.300	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Ekbang	Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan (Rekomendasi)	8 Rekomendasi	129.800.300	

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bag. Ekbang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	46.685.850	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	46.685.850	
21.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bag. Ekbang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik Persandian.	1 Dokumen	46.374.450	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bag. Ekbang	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	83.114.450	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 yang diusulkan melalui E-Fokir, E-Musrenbang dan Proposal dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perubahan Anggaran Tahun 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Volume	Lokasi	Keterangan
1	DMI Kabupaten Luwu Timur	Rp300.000.000	1 Kegiatan	Desa Puncak Indah Kec. Malili	
2	Badan Kontak Majelis Taklim	Rp150.000.000	1 Kegiatan	Desa Puncak Indah Kec. Malili	
3	Sidang Raya XVIII PGI Toraja-Sulawesi Selatan	Rp150.000.000	1 Kegiatan	Toraja Utara	
4	Rumah Tahfiz Qur'an Az Zahrah	Rp200.000.000	1 Kegiatan	Desa Asuli Kec. Towuti	
5	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Penataran Ped	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Lamaeto Kec.Angkona	
6	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Agung Amerta Sari	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Taripa Kec. Angkona	
7	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al-Muhajirin	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Taripa Kec. Angkona	
8	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Taman Sari	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Mantadulu Kec. Angkona	
9	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Pangeran Tangkas Kori Agung	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Taripa Kec. Angkona	
10	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Dalam Bakas	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Wanasari Kec. Angkona	
11	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Raya Al- Muttaqin	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Maliwowo Kec. Angkona	
12	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Toraja Jemaat Lauwo Burau	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Lauwo Kec. Burau	
13	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja GPDJ Jemaat Yehova Rapha	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Bone Pute Kec. Burau	
14	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Toraja Ck.Tiro Mattulili	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Batu Putih Kec. Burau	
15	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Babul Jannah	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Lambara Harapan Kec. Burau	
16	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Gloria	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Volume	Lokasi	Keterangan
17	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al-Muttaqin	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	
18	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Panti Gel - Gel	Rp35.000.000	1 Unit	Desa kalaena kiri II Kec. Kalaena	
19	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja GPT Petra Jemaat Tarabbi	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Tarabbi Kec. Malili	
20	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Ummal	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Balantang Kec. Malili	
21	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Darul Amin Bumi Sawita Permai	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Puncak Indah kec. Malili	
22	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Hasan Perumahan Bumi Sawita Permai	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Puncak Indah kec. Malili	
23	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Puser Jagat Taman Bali Lakawali	Rp45.000.000	1 Unit	Desa Lakawali Kec. Malili	
24	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Kodim Kab. Luwu Timur	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Puncak Indah kec. Malili	
25	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Ilham	Rp400.000.000	1 Unit	Desa Laskap Kec. Malili	
26	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Mangkutana	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Maleku Kec. Mangkutana	
27	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al-Hijrah	Rp75.000.000	1 Unit	Desa Koroncia Kec. Mangkutana	
28	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Katolik Paroki ST. Petrus Mangkutana	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Maleku Kec. Mangkutana	
29	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Masehi Injil di Indonesia Jemaat Hermon Lopi	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana	
30	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Baiturrahman	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur	
31	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Dalem Penataran	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	
32	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Penataran Tiga	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	
33	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Wawondula	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Wawondula Kec. Towuti	
34	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Kibaid Jemaat Wawondula	Rp180.000.000	1 Unit	Desa Wawondula Kec. Towuti	

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Volume	Lokasi	Keterangan
35	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah "Shallom" Palumba	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Matompi Kec. Towuti	
36	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Amal Griya Alam Towuti Wawondula	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Wawondula Kec. Towuti	
37	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al-Fatih	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Matompi Kec. Towuti	
38	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Toraja Cabang Kebaktian Mahalona	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Baruga Kec. Towuti	
39	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Jami' Rahmatullah	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Lioka Kec. Towuti	
40	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Kristen Maranata Indonesia (GKMI) Sidang jemaat Wawondula	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Langkea Raya Kec Towuti	
41	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja POUK Jemaat Wawondula	Rp200.000.000	1 Unit	Desa Wawondula Kec. Towuti	
42	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al Madinah Ninda Kenzu	Rp80.000.000	1 Unit	Desa Matompi Kec. Towuti	
43	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja (GPIL) Jemaat Mahanaim Kawata Cabang Kebaktian Sangga Lea	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Kawata Kec. Wasuponda	
44	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Urako Ledu-Ledu	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda	
45	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Babul Jannah	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Balambano Kec. Wasuponda	
46	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Sahabat di Indonesia Jemaat Silo Wasuponda	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda	
47	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja GPIL Jemaat Bukit Sion Tabarano	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Tabarano Kec. Wasuponda	
48	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja POUK Jemaat Wasuponda	Rp350.000.000	1 Unit	Desa Tabarano Kec. Wasuponda	
49	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Kasih Karunia	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	
50	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Toraja Jemaat Koranti	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Karambua Kec.Wotu	
51	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Darussalam	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Maramba Kec. Wotu	

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Volume	Lokasi	Keterangan
52	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Al-Mujahidin	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Madani Kec. Wotu	
53	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Iman	Rp150.000.000	1 Unit	Desa Bahari Kec. Wotu	
54	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Falah	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	
55	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Nurul Huda	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Kalaena Kec. Wotu	
56	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Pura Pitagiri	Rp75.000.000	1 Unit	Desa Pepuro Barat Kec. Wotu	
57	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Masjid Jabal Samaroh	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Rante Mario Kec. Wotu	
58	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah" Nehemia" Sorowako	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Magani Kec. Nuha	
59	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja GPIL Jemaat Landangi	Rp50.000.000	1 Unit	Desa Matano Kec. Nuha	
60	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Kayu Tanduk	Rp30.000.000	1 Unit	Desa Matano Kec. Nuha	
61	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja GKST Jemaat Sion Landangi	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Matano Kec. Nuha	
62	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Hosana Kayu Tanduk	Rp25.000.000	1 Unit	Desa Matano Kec. Nuha	
63	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Katolik Stasi Pusat Paroki Maria Immaculata Sorowako	Rp100.000.000	1 Unit	Desa Soroako Kec. Nuha	
64	Bantuan hibah pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah Gereja Kibaid Jemaat Landangi	Rp35.000.000	1 Unit	Desa Matano Kec. Nuha	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada indentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 dan isu strategis Tahun 2024.

Sekretariat Daerah sebagai sumber staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur, disamping itu untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
5. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. pembinaan kemasyarakatan dalam artian mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2024 maka Tujuan tersebut menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara mencapai tujuan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Sekretariat Daerah tersebut adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah”.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sehingga Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.	Persentase Rata – Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA	100

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. **Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
- 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4.1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.7 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 Pengadaan Mebel
 - 7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 9.3 Pemeliharaan Mebel
- 9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 10. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 10.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 10.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 10.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 10.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 11. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 11.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 11.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil kepala Daerah
 - 11.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 12. Penataan Organisasi
 - 12.1 Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 12.2 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 12.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 12.4 Monitoring, Evaluasi dan Pemngendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 - 12.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 13. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.1 Fasilitas Keprotokolan
 - 13.2 Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 13.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- B. Program Perekonomian dan pembangunan
 - 14. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 14.1 Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dab BLUD
 - 14.2 Pengendalian Distribusi perekonomian
 - 14.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - 15. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 15.1 Pengendalian dan Evaluasi Program pembangunan
 - 15.2 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

16. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - 16.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 16.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
17. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa
 - 17.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa
 - 17.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 17.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- C. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 18. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - 18.1 Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 18.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 18.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 19. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 19.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
 - 19.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - 19.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
 20. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 20.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 20.2 Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 20.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 21. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 21.1 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
 - 21.2 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Pada Renja Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 3 (tiga) program, 21 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp77.549.615.984,-. Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		100%	32.255.980.197	APBD		100%	31.374.614.299
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100%	178.435.500	APBD		100%	203.553.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 Dokumen	68.775.000	APBD		2 Dokumen	85.443.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 Dokumen	8.523.500	APBD		2 Dokumen	14.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 dokumen	6.750.000	APBD		2 dokumen	7.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10 Laporan	94.387.000	APBD		10 Laporan	96.110.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100%	12.672.847.951	APBD		100%	14.017.448.892

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	84 orang	12.364.847.851	APBD		84 orang	13.792.230.892
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9 Dokumen	249.890.000	APBD		9 Dokumen	154.120.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	14 Lapporan	57.910.300	APBD		14 Lapporan	71.098.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100%	108.533.200	APBD		100%	110.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4 Laporan	108.533.200	APBD		4 Laporan	110.000.000
4	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dikelola	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100%	29.300.000	APBD		100%	25.800.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12 Laporan	29.300.000	APBD		12 Laporan	25.800.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bag.Umum	100%	335.008.575	APBD		100%	235.730.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Bag Umum	12 Dokumen	79.268.575	APBD		12 Dokumen	56.500.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bag Umum	29 Orang	116.510.000	APBD		29 Orang	60.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Bag Umum	25 Orang	139.230.000	APBD		25 Orang	119.230.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	100%	3.756.989.005	APBD		100%	3.570.058.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bag. Umum	40 Paket	78.995.000	APBD		40 Paket	80.855.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bag Umum	7 Paket	142.450.000	APBD		7 Paket	135.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Bag Umum	7 Paket	445.840.000	APBD		7 Paket	125.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bag Umum	52 Paket	411.454.205	APBD		52 Paket	495.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bag Umum	11 Paket	53.570.000	APBD		11 Paket	56.200.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bag Umum	1980 Eksemplar	210.000.000	APBD		1980 Eksemplar	191.160.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bag Umum	12 Laporan	567.025.000	APBD		12 Laporan	635.850.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag Umum	12 Laporan	1.847.654.800	APBD		12 Laporan	1.850.993.600
	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	Bag Umum	20 dok	-	APBD		20 dok	25.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	Bagian Umum	100%	2.201.417.788	APBD		100%	1.515.000.000
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional/Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum	1 Unit	466.600.000	APBD		1 Unit	750.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bagian Umum	104 Unit	249.000.000	APBD		104 Unit	200.000.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Bag. Umum	34 Unit	748.317.788	APBD		34 Unit	350.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Bag. Umum	4 Unit	737.500.000	APBD		4 Unit	215.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bag. Umum	100%	1.809.858.684	APBD		100%	1.625.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Umum	12 Laporan	21.058.684	APBD		12 Laporan	25.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bag. Umum	12 Laporan	1.038.800.000	APBD		12 Laporan	850.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bag. Umum	12 Laporan	750.000.000	APBD		12 Laporan	750.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Bag. Umum	100%	2.648.995.000	APBD		100%	2.195.485.395
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bag. Umum	40 unit	923.060.000	APBD		40 unit	950.485.395
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dgn dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bag. Umum	3 unit	46.500.000	APBD		3 unit	50.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Bag. Umum	77 unit	97.820.000	APBD		77 unit	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bag. Umum	130 unit	261.490.000	APBD		130 unit	195.000.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Bag. Umum	10 Unit	1.320.125.000	APBD		10 Unit	950.000.000
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	Bagian Umum	100%	4.323.582.394	APBD		100%	3.673.579.436
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	2 Orang	791.956.394	DAU		2 Orang	766.552.436
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	9 Paket	77.000.000	APBD		9 Paket	75.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	8 Orang	100.000.000	APBD		8 Orang	100.000.000
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	2 Orang	2.394.624.000	APBD		2 Orang	2.732.027.000
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess	Bagian Umum	100%	1.764.942.000	APBD		100%	1.764.942.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	3 Paket	860.000.000	APBD		3 Paket	860.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	3 Paket	600.000.000	APBD		3 Paket	590.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	7 Paket	315.100.000	APBD		7 Paket	314.942.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12	Penataan Organisasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Bagian Organisasi	65,85%	1.117.305.600	APBD		65,85%	1.605.642.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	10 Dokumen	311.183.100	APBD		10 Dokumen	400.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	2 Laporan	171.025.500	APBD		2 Laporan	280.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	226.531.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	1 Dokumen	106.236.500	APBD		2 Laporan	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	1 Dokumen	302.329.500	APBD		1 Dokumen	225.642.000
13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang dihasilkan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	765 Kegiatan	1.306.306.500	APBD		765 Kegiatan	832.374.976
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	621.025.000	APBD		12 Laporan	342.312.921
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	142.309.000	APBD		12 Laporan	100.249.949
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	542.972.000	APBD		12 Laporan	389.812.106
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan		100%	42.408.736.900	APBD		100%	33.767.899.619
14	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	Bagian Pemerintahan	4 Rekomendasi	485.279.000	APBD		4 Rekomendasi	589.069.691

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	4 Dokumen	117.612.000	APBD		4 Dokumen	149.962.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	50 Dokumen	148.513.000	APBD		50 Dokumen	167.466.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	4 Dokumen	203.000.000	APBD		4 Dokumen	271.641.691
15	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan		4 Rekomendasi	40.983.850.400	APBD		4 Rekomendasi	32.037.541.747
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	5 Dokumen	20.606.710.700	APBD		5 Dokumen	15.222.047.190
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bagian Kesra	2 Dokumen	1.795.352.300	APBD		2 Dokumen	1.919.680.335
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Bagian Kesra	1 Dokumen	18.581.787.400	APBD		1 Dokumen	14.895.814.222
16	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	Bagian Hukum	85%	855.801.500	APBD		85%	970.000.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian Hukum	400 Produk Hukum	205.755.600	APBD		400 Produk Hukum	400.000.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	9 Kasus	483.937.500	APBD		9 Kasus	400.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi	Bagian Hukum	400 Produk Hukum	166.108.400	APBD		400 Produk Hukum	170.000.000
17	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)	Bagian pemerintahan	20 PKS	99.736.000	APBD		20 PKS	171.288.181
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	20 Dokumen	77.556.000	APBD		20 Dokumen	119.285.271
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan	-	-			-	94.549.400
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Pemerintahan	4 Laporan	22.180.000	APBD		4 Laporan	52.002.910
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)		100%	2.380.074.653	APBD		100%	2.436.808.828
18	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	100 %	678.571.806	APBD		100 %	463.305.295
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	2 Dokumen	512.468.300	APBD		2 Dokumen	294.550.630
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	4 Laporan	119.798.356	APBD		4 Laporan	117.819.000

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	2 Dokumen	46.305.150	APBD		2 Dokumen 50.935.665
19	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dihasilkan	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	100 %	122.663.162	APBD		100 %	144.962.751
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	12 Laporan	59.086.638	APBD		12 Laporan	82.162.751
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	4 Laporan	63.576.524	APBD		4 Laporan	62.800.000
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.473.258.610	APBD		100%	1.711.534.682
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	228.970.000	APBD		12 Dokumen	777.530.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	753.754.860	APBD		12 Dokumen	753.754.682
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	490.533.750	APBD		50 Orang	180.250.000
21	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan (Rekomendasi)	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	8 Rekomendasi	105.581.075	APBD		8 Rekomendasi	117.006.100

Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Anggaran Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	2 Dokumen	10.540.000	APBD		2 Dokumen	54.206.100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	1 Dokumen	19.950.000	APBD		1 Dokumen	62.800.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 program, 21 kegiatan 68 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp77.549.615.984,- Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1

ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			77.549.615.984	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			77.549.615.984	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	32.255.980.197	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Prokopim
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan termanfaatkan	100%	178.435.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	68.775.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.523.500	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	6.750.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	94.387.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	12.672.847.951	Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang	12.364.847.851	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	249.890.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	14 Lapporan	57.910.300	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan memanfaatkan	100%	108.533.200	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	108.533.200	
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pendapatan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan memanfaatkan	100%	29.300.000	
4.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Laporan	29.300.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	100%	335.008.575	Bagian Umum
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen	79.268.575	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	29 Orang	116.510.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	25 Orang	139.230.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.756.989.005	Bagian Umum
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 Paket	78.995.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	142.450.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	7 Paket	445.840.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	411.454.205	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	53.570.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Eksemplar	210.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	567.025.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.847.654.800	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	2.201.417.788	Bagian Umum
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	466.600.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	104 Unit	249.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	34 Unit	748.317.788	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	737.500.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.809.858.684	Bagian Umum
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.058.684	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	1.038.800.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	100%	2.648.995.000	Bagian Umum
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40 unit	923.060.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dgn dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	46.500.000	
4.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	77 unit	97.820.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	130 unit	261.490.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.320.125.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	4.323.582.394	Bagian Umum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	791.956.394	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	77.000.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	100.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2.394.624.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga pimpinan yang terpenuhi	100%	1.764.942.000	Bagian Umum
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	860.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	600.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	315.100.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	65,85%	1.117.305.600	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	311.183.100	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	171.025.500	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	226531.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	106.236.500	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	302.329.500	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang dihasilkan	765 Kegiatan	1.306.306.500	Bagian Prokopim
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	621.025.500	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	142.309.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	542.972.000	
4.01.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100%	42.408.736.900	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
4.01.01.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	485.279.000	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	117.612.000	
4.01.01.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen	148.513.000	
4.01.01.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	203.000.000	
4.01.01.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	40.983.850.400	Bagian Kesra
4.01.01.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	20.606.710.700	
4.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	1.795.352.300	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	18.581.787.400	
4.01.01.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan	100%	855.801.500	Bagian Hukum
4.01.01.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Produk Hukum	205.755.600	
4.01.01.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	483.937.500	
4.01.01.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Produk Hukum	166.108.400	
4.01.01.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)	20 PKS	99.736.000	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	77.556.000	
4.01.01.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	22.180.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	2.380.074.653	Bagian Ekbang
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan	100%	678.571.806	Bagian Ekbang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	SKPD Penanggungjawab
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	512.468.300	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	119.798.356	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	46.305.150	
4.01.03..2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan	100 %	122.663.162	Bagian Ekbang
4.01.03..2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	59.086.638	
4.01.03..2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	63.576.524	
4.01.03..2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana	100 %	1.473.258.610	Bagian PBJ
4.01.03..2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	228.970.000	
4.01.03..2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	753.754.860	
4.01.03..2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	490.533.750	
4.01.03..2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	100%	105.581.075	Bagian Ekbang
4.01.03..2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	10.540.000	
4.01.03..2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	19.950.000	
	Total			77.549.615.984	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026, dimana Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan untuk Tahun 2024 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Program, 21 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.77.549.615.984,00,- (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2024 selanjutnya merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mencakup arah kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun. Untuk mendukung capaian indikator sasaran dan meningkatkan kinerja, maka dalam perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan prinsip – prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 yaitu **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA ”**.

Malili, 2024
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007